

BANGUNAN

2012

PERDA NO. 2 LD 2012/ NO. 2 SETDA YOGYAKARTA: 39 HLM

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG BANGUNAN GEDUNG

ABSTRAK

Dalam rangka meningkatkan ketertiban, pengendalian dan terwujudnya bangunan gedung yang fungsional, andal yang menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan bagi pengguna serta selaras dengan lingkungannya diperlukan pengaturan tentang Bangunan Gedung serta berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, pengaturan Bangunan Gedung berserta Izin Membangun Bangunan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah

Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah:

UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 18 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. Tahun 2008; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 11 Tahun 2010; UU No. 1 Tahun 2011; PP No. 27 Tahun 1999; PP No. 36 Tahun 2005; PP No. 34 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; Permen PU No. 29/PRT/2006; Permendagri No. 1 Tahun 2007; Permendagri No. 33 Tahun 2007; Permen PU No. 30/PRT/M/2006; Permen PU No. 24/PRT/M/2007; Permen PU No. 25/PRT/M/2007; Permen PU No. 26/PRT/M/2007; Permen PU No. 05/PRT/M/2008; Permen PU No. 24/PRT/M/2008; Permen PU No. 26/PRT/M/2008; Perda Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta No. 2 Tahun 1988; Perda Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta No. 1 Tahun 1992; Perda Kota Yogyakarta No. 1 Tahun 2007; Perda Kota Yogyakarta No. 3 Tahun 2008; Perda Kota Yogyakarta No. 2 Tahun 2010

Dalam Peraturan Daerah ini secara garis besar mengatur tentang ketentuan yang berkaitan dengan fungsi bangunan gedung, persyaratan bangunan gedung, penyelenggaraan bangunan gedung, Izin Mendirikan Bangunan, Sertifikat Laik Fungsi dan, peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung, sehingga dengan adanya Peraturan Daerah ini akan terwujud bangunan dan lingkungan yang aman, sehat, nyaman dan accessible menempati bangunan gedung secara serasi dan selaras. Isi Peraturan Daerah ini meliputi ketentuan umum yang memuat tentang istilah-istilah yang dimaksud dalam peraturan ini; ruang lingkup; maksud dan tujuan; fungsi bangunan gedung; persyaratan bangunan gedung; izin mendirikan bangunan; sertifikat laik fungsi bangunan gedung (SLF); pengawasan; pelayanan administrasi IMB; pembongkaran; peran serta masyarakat; insentif; sanksi administrasi; ketentuan pidana; penyidikan; ketentuan peralihan; ketentuan penutup

CATATAN

- Peraturan Daerah ini ditetapkan dan diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 12 Januari 2012
- Penjelasan terdiri dari 9 halaman